



LAPORAN RTP OPERASIONAL SEMESTER II

(Rencana Tindak Pengendalian)

TAHUN **2024**

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI1

BAB I.....2

1.1. Latar Belakang2

1.2. Dasar Hukum2

1.3. Maksud dan Tujuan.....3

1.4. Ruang Lingkup3

BAB II.....4

2.1. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko OPerasional Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Banyumas.....4

2.2. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2024
.....14

2.3. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan14

2.4. Monitoring Risiko dan RTP.....14

BAB III15

LAMPIRAN16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan tersebut diatas dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti Renstra 2024-2026, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/

Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 12);
- 7) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 107 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan pengelolaan risiko adalah untuk mengelola risiko yang mendukung pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas melalui identifikasi, analisis dan pengendalian risiko serta pemantauan aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Penyusunan laporan pengelolaan risiko bertujuan sebagai alat untuk memantau proses pengelolaan risiko selama tahun 2024.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pengelolaan risiko ini adalah kegiatan pengelolaan risiko operasional kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas selama Tahun 2024.

BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

2.1. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko OPerasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

Pelaporan pengelolaan risiko Tahun 2024 bertujuan untuk mengetahui apakah risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis benar-benar terjadi dan apakah rencana pengendalian untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah efektif. Hal ini sangat penting sebagai bahan kajian untuk mengelola risiko operasional tahun 2024. Pelaporan dilakukan dengan pengisian form 8, 9 dan 10 pada dokumen RTP Tahun 2024.

Jumlah risiko operasional yang teridentifikasi setelah dimutakhirkan sebanyak 49 risiko dengan jumlah risiko prioritas yang terpilih untuk disusun rencana tindak pengendaliannya sebanyak 23 risiko, dan rencana tindak pengendalian (RTP) yang telah disusun pada form 7 sebanyak 23 RTP. Permutakhiran risiko dilakukan sebagai bentuk persiapan dalam penilaian maturitas SPIP, sehingga diperlukan untuk merevisi risiko dengan memasukkan risiko kecurangan.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas selama tahun 2024 yang telah disusun pada form 7 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Rencana Tindak Pengendalian Atas Risiko Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Masih ada sampah yang belum terkelola dengan baik dan ada sampah yang dibuang sembarangan		Melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Triwulan II dan III
2	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih kurang dan belum optimal		Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengoptimalkan sarana dan prasana persampahan serta meningkatkan kinerja SDM pengolahan sampah	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	
3	Sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3 tidak terkelola dengan baik		Melakukan pengumpulan sampah spesifik LB3 dan melakukan sosialisasi pengelolaan sampah spesifik LB3 kepada masyarakat	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait sampah spesifik LB3 dan melengkapi prasarana dalam pengumpulan LB3	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan II dan III
4	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis		Penyusunan dokumen analisis/ kajian menggunakan referensi dan / atau rekomendasi dari instansi vertikal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melengkapi dokumen kajian yang dipersyaratkan dalam penyusunan KLHS	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan II dan III

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
5	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		Sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/ kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan II dan III
6	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi serta menimbulkan kerusakan lingkungan hidup		Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/masyarakat tentang pengelolaan lingkungan dalam menjalankan usaha/ kegiatan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan II dan III
7	Terjadi pencemaran air, udara dan kerusakan tanah		Melakukan penanggulangan kerusakan tanah, pencemaran air dan udara	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan sumber daya tanah, air dan udara	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan II dan III
8	Menurunnya ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup		Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan II dan III

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
						aturan pengelolaan lingkungan hidup		
9	Kurangnya ketersediaan informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup		Koordinasi data antar bidang, OPD dan instansi terkait, penyelenggaran sistem informasi lingkungan melalui website dinas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyampaian rekomendasi tindak lanjut peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada OPD terkait, peningkatan sistem informasi lingkungan hidup	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan II dan III
10	Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup		Edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup, pembinaan sekolah adiwiyata, saka kalpataru dan kelompok masyarakat	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat peduli lingkungan hidup, pendampingan terhadap kader dalam melaksanakan tugasnya	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan II dan III
11	Konflik kepentingan dengan pihak pemohon perizinan lingkungan (Risiko Kecurangan)		Sosialisasi peraturan terkait perizinan lingkungan dan penerapan SOP	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Optimalisasi SOP tata laksana penerbitan perizinan lingkungan dan penguatan integritas pegawai pelayanan perizinan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan II dan III

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
12	Penyusunan spesifikasi teknis mengarah kepada spesifikasi/merk/produk tertentu		1. Perpres PBJ dan Perlem LKPP 2. Tim Teknis Pengadaan 3. Pengadaan melalui e-Purchasing 4. Dokumentasi formal hasil Reviu dari UKPBJ.	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN sesuai Peraturan Peraturan Bupati Banyumas No.44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Peraturan Bupati Banyumas No. 59 Tahun 2017 secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS.	Kepala DLH	Triwulan I, II, III, IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
13	Pejabat/petugas pelayanan perizinan lingkungan menerima gratifikasi		1. Sosialisasi Peraturan terkait Perizinan Lingkungan 2. Penerapan SOP Perizinan Lingkungan 3. Pelayanan sesuai antrian 4. Aplikasi Amdal-net 5. Pakta Integritas Pejabat / petugas pelayanan perizinan lingkungan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN Peraturan Bupati Banyumas No.44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Bupati Banyumas No. 59 Tahun 2017 secara bertahap. 2. Optimalisasi SOP tata laksana penerbitan perizinan lingkungan 3. Optimalisasi Wilayah bebas Korupsi 4. Penggunaan Amdalnet 5. Layanan Pengaduan Masyarakat	Kepala DLH	Triwulan I, II, III, IV
14	Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/tim pemroses penerbitan perizinan		1. Sosialisasi aturan perizinan 2. SOP Pelayanan perizinan 3. Perizinan online	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penguatan integritas pada saat apel 2. Optimalisasi SOP 3. Transparansi perizinan	Kepala DLH	Triwulan I, II, III, IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
15	KSM tidak membayar sewa atas penggunaan sarpras persampahan dan retribusi jasa pengolahan sampah sesuai dengan ketentuan		Perda No. 10 Tahun 2021 tentang Rertibusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas dan Perbup Retribusi No.10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Pembinaan kepada KSM secara rutin 2. Monitoring dan evaluasi lapangan secara insidental. 3. Optimalisasi SOP Pelayanan Retribusi	Kepala DLH	Triwulan I, II, III, IV
16	Penerapan sanksi adminitrasi kepada pelaku usaha tidak berjalan semestinya		1. PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. PermenLH No 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN Peraturan Bupati Banyumas No.44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Bupati Banyumas No. 59 Tahun 2017 secara bertahap. 2. Sosialisasi kepada Pelaku Usaha/Kegiatan terkait pnaatan peraturan	Kepala DLH	Triwulan I, II, III, IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
						dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sanksi administrasi 3.Optimalisasi Wilayah Bebas Korupsi		
17	Pengelolaan limbah B3 tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan SOP		1. PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Limbah B3	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN Peraturan Bupati Banyumas No.44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Bupati Banyumas No. 59 Tahun 2017 secara bertahap. 2. Sosialisasi kepada Pelaku Usaha/Kegiatan terkait penaatan peraturan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sanksi administrasi	Kepala DLH	Triwulan I, II, III, IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
						3.Optimalisasi Wilayah Bebas Korupsi		
18	Tidak semua desa mendapatkan sosialisasi dan pembinaan Program Kampung Iklim		Sosialisasi dan pembinaan kampung iklim	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan monev kampung iklim	Kepala DLH	Triwulan I, II, III, IV
19	Tidak semua sekolah mendapatkan sosialisasi dan pembinaan sekolah adiwiyata		Sosialisasi dan pembinaan sekolah adiwiyata	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan monev sekolah Adiwiyata	Kepala DLH	Triwulan I, II, III, IV
20	Pengelolaan sampah di KSM tidak berjalan dengan baik		Pembinaan dan pelatihan pengelolaan sampah bagi KSM	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan kompetensi personil dan dan penguatan kelembagaan KSM	Kepala DLH	Triwulan I, II, III, IV
21	Pohon yang ditanam untuk RTH tidak tumbuh (mati)		Perawatan setelah masa penanaman pohon	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan pemeliharaan dan pengawasan di RTH publik	Kepala DLH	Triwulan I, II, III, IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
22	Penanganan pengaduan tidak tuntas		Tindak lanjut penanganan pengaduan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan pengawasan pasca penanganan pengaduan (monev)	Kepala DLH	Triwulan I, II, III, IV
23	Proses penerbitan rekomendasi lingkungan lama		Sosialisasi sistem Amdalnet untuk sebagian personil pelayanan perizinan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Sosialisasi dan pelatihan bagi personil pelayanan perizinan	Kepala DLH	Triwulan I, II, III, IV

2.2. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2024

Berdasarkan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang telah direncanakan tahun 2024 seperti pada Tabel 1 di atas, telah dilaksanakan sesuai rencana, meskipun ada beberapa kegiatan pemantauan yang tidak terdokumentasi dengan baik. Namun, secara keseluruhan kegiatan pengendalian telah dilaksanakan oleh masing-masing penanggungjawab.

2.3. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atas risiko yang telah disusun adalah kurangnya dokumentasi kegiatan pada saat pemantauan. Namun, tidak berdampak besar terhadap pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas karena Rencana Tindak Pengendalian risikonya tetap dilaksanakan sesuai rencana.

2.4. Monitoring Risiko dan RTP

Pelaksanaan kegiatan monitoring risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dilakukan dengan menganalisis hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP atas risiko operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 yaitu dengan pengisian form 8 sampai dengan form 10.


Hasil monitoring atas pengkomunikasian risiko Dinas Lingkungan Hidup (Form 8) sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hasil monitoring terhadap pelaksanaan RTP (Form 9) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan pemantauan yang tidak terdokumentasi, sehingga bukti pelaksanaan pemantauan menggunakan dokumentasi saat rencana tindak pengendalian dilaksanakan. Sedangkan hasil monitoring terhadap keterjadian risiko (Form 10) menunjukkan masih terdapat risiko yang terjadi meskipun RTP telah dilaksanakan, salah satu penyebabnya adalah factor eksternal yang harus lebih dipantau dan diawasi secara ketat.

BAB III

PENUTUP

Laporan pengelolaan risiko operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas tahun 2024 disusun untuk memantau proses pengelolaan risiko. Berdasarkan hasil monitoring kegiatan pengkomunikasian risiko/RTP (Form 8), kegiatan pemantauan terhadap RTP (Form 9), dan keterjadian risiko (Form 10) menunjukkan hasil yang cukup baik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas harus terus melakukan monitoring pengelolaan risiko periode selanjutnya secara lebih intensif dan berkala, serta akan mendokumentasikan setiap kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan dengan lebih terstruktur. Lebih lanjut laporan pengelolaan risiko ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

Punwokerto, 17 Januari 2025


KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS
WIDODO SUGIRI, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19710610 200312 1 005

LAMPIRAN

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Dinas Lingkungan Hidup
 Tahun Penilaian : 2025
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH
2	Mengoptimalkan sarana dan prasana persampahan serta meningkatkan kinerja SDM pengolahan sampah	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH
3	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait sampah spesifik LB3 dan melengkapi prasarana dalam pengumpulan LB3	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
4	Melengkapi dokumen kajian yang dipersyaratkan dalam penyusunan KLHS	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH
5	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH
6	Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH
7	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan sumber daya tanah, air dan udara	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH
8	Meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar aturan pengelolaan lingkungan hidup	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
							<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH
9	Penyampaian rekomendasi tindak lanjut peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada OPD terkait, peningkatan sistem informasi lingkungan hidup	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH
10	Meningkatkan edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat peduli lingkungan hidup, pendampingan terhadap kader dalam melaksanakan tugasnya	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH
11	Optimalisasi SOP tata laksana penerbitan perizinan lingkungan dan penguatan integritas pegawai pelayanan perizinan	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH
12	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN sesuai Peraturan Peraturan Bupati Banyumas No.44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Peraturan Bupati Banyumas No. 59 Tahun 2017 secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS.	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
13	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN Peraturan Bupati Banyumas No.44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Bupati Banyumas No. 59 Tahun 2017 secara bertahap. 2. Optimalisasi SOP tata laksana penerbitan perizinan lingkungan 3. Optimalisasi Wilayah bebas Korupsi 4. Penggunaan Amdalnet 5. Layanan Pengaduan Masyarakat 	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH
14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan integritas pada saat apel 2. Optimalisasi SOP 3. Transparansi perizinan 	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH
15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kepada KSM secara rutin 2. Monitoring dan evaluasi lapangan secara insidentil. 3. Optimalisasi SOP Pelayanan Retribusi 	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
16	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN Peraturan Bupati Banyumas No.44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Bupati Banyumas No. 59 Tahun 2017 secara bertahap. 2. Sosialisasi kepada Pelaku Usaha/Kegiatan terkait penataan peraturan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sanksi administrasi 3. Optimalisasi Wilayah Bebas Korupsi 	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH
17	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN Peraturan Bupati Banyumas No.44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Bupati Banyumas No. 59 Tahun 2017 secara bertahap. 2. Sosialisasi kepada Pelaku Usaha/Kegiatan terkait penataan peraturan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sanksi administrasi 3. Optimalisasi Wilayah Bebas Korupsi 	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
18	Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan monev kampung iklim	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH
19	Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan monev sekolah Adiwiyata	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH
20	Meningkatkan kompetensi personil dan dan penguatan kelembagaan KSM	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH
21	Meningkatkan pemeliharaan dan pengawasan di RTH publik	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
22	Meningkatkan pengawasan pasca penanganan pengaduan (monev)	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH
23	Sosialisasi dan pelatihan bagi personil pelayanan perizinan	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I dan II	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH

Sumber : MRI, DLH Kab. Banyumas

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Dinas Lingkungan Hidup
 Tahun Penilaian : 2025
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Juni 2024 • 24 & 25 Juli 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Pembahasan Hasil Reviu RTP oleh Inspektorat • Pelatihan pengelolaan sampah kepada masyarakat
2	Mengoptimalkan sarana dan prasana persampahan serta meningkatkan kinerja SDM pengolahan sampah	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Juni 2024 • 23-25 Desember 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Pembahasan Hasil Reviu RTP oleh Inspektorat • Pemeliharaan alat pegolah sampah
3	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait sampah spesifik LB3 dan melengkapi prasarana dalam pengumpulan LB3	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Juni 2024 • 26 Feb, 07 Feb, 26 Juni 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Pembahasan Hasil Reviu RTP oleh Inspektorat • Rakor persiapan pemantauan dan pengawasan bidang Pengendalian Lingkungan Hidup
4	Melengkapi dokumen kajian yang dipersyaratkan dalam penyusunan KLHS	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Juni 2024 • 19 Agustus, 12 Desember 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Pembahasan Hasil Reviu RTP oleh Inspektorat • Rapat koordinasi bidang Tata Lingkungan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
5	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Juni 2024 • 26 Feb, 07 Feb, 26 Juni 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Pembahasan Hasil Reviu RTP oleh Inspektorat • Rakor persiapan pemantauan dan pengawasan bidang Pengendalian Lingkungan Hidup
6	Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Juni 2024 • 26 Feb, 07 Feb, 26 Juni 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Pembahasan Hasil Reviu RTP oleh Inspektorat • Rakor persiapan pemantauan dan pengawasan bidang Pengendalian Lingkungan Hidup
7	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan sumber daya tanah, air dan udara	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Juni 2024 • 7 Februari & 14 Agustus 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Pembahasan Hasil Reviu RTP oleh Inspektorat • Rapat Koordinasi Internal Proklam
8	Meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar aturan pengelolaan lingkungan hidup	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Juni 2024 • 26 Feb, 07 Feb, 26 Juni 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Pembahasan Hasil Reviu RTP oleh Inspektorat • Rakor persiapan pemantauan dan pengawasan bidang Pengendalian Lingkungan Hidup
9	Penyampaian rekomendasi tindak lanjut peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada OPD terkait, peningkatan sistem informasi lingkungan hidup	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Juni 2024 • 19 Agustus, 12 Desember 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Pembahasan Hasil Reviu RTP oleh Inspektorat • Rapat koordinasi bidang Tata Lingkungan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
10	Meningkatkan edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat peduli lingkungan hidup, pendampingan terhadap kader dalam melaksanakan tugasnya	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Juni 2024 • 19 Agustus, 12 Desember 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Pembahasan Hasil Reviu RTP oleh Inspektorat • Rapat koordinasi bidang Tata Lingkungan
11	Optimalisasi SOP tata laksana penerbitan perizinan lingkungan dan penguatan integritas pegawai pelayanan perizinan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Juni 2024 • 19 Agustus, 12 Desember 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Pembahasan Hasil Reviu RTP oleh Inspektorat • Rapat koordinasi bidang Tata Lingkungan
12	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN sesuai Peraturan Peraturan Bupati Banyumas No.44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Peraturan Bupati Banyumas No. 59 Tahun 2017 secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS. (risiko fraud)	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris dan PPK	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 2 September, 23 September, 4 November, 30 September, 23 Desember, 16 Desember, 9 Desember, 25 November • 19 Agustus, 12 Desember 2024 • 20 Desember 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan integritas saat Apel • Rakor Rapat koordinasi perizinan di bidang TL • Evaluasi Kinerja DLH

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
13	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN Peraturan Bupati Banyumas No.44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Bupati Banyumas No. 59 Tahun 2017 secara bertahap. 2. Optimalisasi SOP tata laksana penerbitan perizinan lingkungan 3. Optimalisasi Wilayah bebas Korupsi 4. Penggunaan Amdalnet 5. Layanan Pengaduan Masyarakat <p>(risiko fraud)</p>	Konfirmasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan	Bidang Tata Lingkungan	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 2 September, 23 September, 4 November, 30 September, 23 Desember, 16 Desember, 9 Desember, 25 November • 19 Agustus, 12 Desember 2024 • 20 Desember 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan integritas saat Apel • Rakor bidang TL tentang perizinan • Evaluasi Kinerja DLH
14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan integritas pada saat apel 2. Optimalisasi SOP 3. Transparansi perizinan <p>(risiko fraud)</p>	Konfirmasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan	Bidang Tata Lingkungan	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 2 September, 23 September, 4 November, 30 September, 23 Desember, 16 Desember, 9 Desember, 25 November • 19 Agustus, 12 Desember 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan integritas saat Apel • Rapat koordinasi perizinan di bidang TL, SOP perizinan
15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kepada KSM secara rutin 2. Monitoring dan evaluasi lapangan secara insidentil. 3. Optimalisasi SOP Pelayanan Retribusi <p>(risiko fraud)</p>	Konfirmasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan	Bidang Pengelolaan Persampahan	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 15 Juli, 5 September 2024 • 12 & 17 Desember 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Rakor internal bidang PP • Rapat2 retribusi

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
16	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN Peraturan Bupati Banyumas No.44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Bupati Banyumas No. 59 Tahun 2017 secara bertahap. 2. Sosialisasi kepada Pelaku Usaha/Kegiatan terkait penataan peraturan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sanksi administrasi 3. Optimalisasi Wilayah Bebas Korupsi <p>(risiko fraud)</p>	Konfirmasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan	Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 2 September, 23 September, 4 November, 30 September, 23 Desember, 16 Desember, 9 Desember, 25 November • 26 Feb, 07 Feb, 26 Juni 2024 • 20 September 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan integritas saat Apel • Rakor Internal bidang PLH • Evaluasi Kinerja DLH
17	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN Peraturan Bupati Banyumas No.44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Bupati Banyumas No. 59 Tahun 2017 secara bertahap. 2. Sosialisasi kepada Pelaku Usaha/Kegiatan terkait penataan peraturan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sanksi administrasi 3. Optimalisasi Wilayah Bebas Korupsi <p>(risiko fraud)</p>	Konfirmasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 2 September, 23 September, 4 November, 30 September, 23 Desember, 16 Desember, 9 Desember, 25 November • 26 Feb, 07 Feb, 26 Juni 2024 • 20 September 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan integritas saat Apel • Rakor Internal bidang PLH • Evaluasi Kinerja DLH

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
18	Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan monev kampung iklim (risiko fraud)	Konfirmasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan I, II, III, IV	7 Februari & 14 Agustus 2024	Rakor internal bidang PLH tentang Proklamasi
19	Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan monev sekolah Adiwiyata (risiko fraud)	Konfirmasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan I, II, III, IV	19 Agustus, 12 Desember 2024	Rakor internal bidang TL tentang Adiwiyata
20	Meningkatkan kompetensi personil dan penguatan kelembagaan KSM (risiko fraud)	Konfirmasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah	Triwulan I, II, III, IV	4,5,16 Juli 2024	Rakor internal bidang PP tentang pembinaan KSM
21	Meningkatkan pemeliharaan dan pengawasan di RTH public (risiko fraud)	Konfirmasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau	Triwulan I, II, III, IV	25-Sep-24	Rakor internal bidang RTH
22	Meningkatkan pengawasan pasca penanganan pengaduan (monev) (risiko fraud)	Konfirmasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan I, II, III, IV	26 Feb, 07 Feb, 26 Juni 2024	Rakor internal bidang PLH tentang pengaduan
23	Sosialisasi dan pelatihan bagi personil pelayanan perizinan (risiko fraud)	Konfirmasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan I, II, III, IV	19 Agustus, 12 Desember 2024	Rakor internal bidang TL tentang perizinan

Sumber : MRI, DLH Kab. Banyumas

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

Nama Pemda : Dinas Lingkungan Hidup
Tahun Penilaian : 2025
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi serta menimbulkan kerusakan lingkungan hidup	ROO.21 .211.13. 13				Tidak terjadi	Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Triwulan II dan III	• 13 Feb, 17 Mei, 13 Agustus 2024	• Sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan limbah B3
2	Konflik kepentingan dengan pihak pemohon perizinan lingkungan (Risiko Kecurangan)	ROO.21 .211.13. 13				Tidak terjadi	Optimalisasi SOP tata laksana penerbitan perizinan lingkungan dan penguatan integritas pegawai pelayanan perizinan	Triwulan II dan III	23-25 Desember 2024	Pemeliharaan alat pegolah sampah
3	KSM tidak membayar sewa atas penggunaan sarpras persampahan dan retribusi jasa pengolahan sampah sesuai dengan ketentuan	ROO.21 .211.13. 13				Tidak terjadi	1. Pembinaan kepada KSM secara rutin 2. Monitoring dan evaluasi lapangan secara insidental. 3. Optimalisasi SOP Pelayanan Retribusi	Triwulan I, II, III, IV	3 Mei & 10 Desember 2024	Koordinasi dan Evaluasi pengelolaan sampah dengan KSM

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
4	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis	ROO.21 .211.13. 13				Tidak terjadi	Melengkapi dokumen kajian yang dipersyaratkan dalam penyusunan KLHS	Triwulan II dan III	13 Agustus, 11 September, 25 Oktober 2024	Rapat Penyusunan Dokumen KLHS
5	Kurangnya ketersediaan informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup	ROO.21 .211.13. 13				Tidak terjadi	Penyampaian rekomendasi tindak lanjut peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada OPD terkait, peningkatan sistem informasi lingkungan hidup	Triwulan II dan III	21 Mei 2024	Pembahasan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
6	Masih ada sampah yang belum terkelola dengan baik dan ada sampah yang dibuang sembarangan	ROO.21 .211.13. 13				Tidak terjadi	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Triwulan II dan III	24 & 25 Juli	Pelatihan pengelolaan sampah kepada masyarakat
7	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	ROO.21 .211.13. 13				Tidak terjadi	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Triwulan II dan III	13 Feb, 17 Mei, 13 Agustus 2024	Sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan limbah B3
8	Menurunnya ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	ROO.21 .211.13. 13				Tidak terjadi	Meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar	Triwulan II dan III	6-7 Maret 2024 dan 22 Mei 2024	Pemantauan dan pengawasan kepada pelaku usaha

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
							aturan pengelolaan lingkungan hidup			
9	Pejabat/petugas pelayanan perizinan lingkungan menerima gratifikasi	ROO.21 .211.13. 13				Tidak terjadi	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN Peraturan Bupati Banyumas No.44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Bupati Banyumas No. 59 Tahun 2017 secara bertahap. 2. Optimalisasi SOP tata laksana penerbitan perizinan lingkungan 3. Optimalisasi Wilayah bebas Korupsi 4. Penggunaan Amdalnet 5. Layanan Pengaduan Masyarakat	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> 2 September, 23 September, 4 November, 30 September, 23 Desember, 16 Desember, 9 Desember, 25 November 15 November, 12 September, 13 November, 5 November 20 Desember 2024 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan integritas saat Apel Rapat-rapat perizinan Evaluasi Kinerja DLH
10	Penanganan pengaduan tidak tuntas	ROO.21 .211.13. 13				Tidak terjadi	Meningkatkan pengawasan pasca penanganan pengaduan (monev)	Triwulan I, II, III, IV	28 Mei 2024	Penanganan pengaduan pencemaran limbah

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
11	Penerapan sanksi administrasi kepada pelaku usaha tidak berjalan semestinya	ROO.21 .211.13. 13				Tidak terjadi	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN Peraturan Bupati Banyumas No.44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Bupati Banyumas No. 59 Tahun 2017 secara bertahap. 2 Sosialisasi kepada Pelaku Usaha/Kegiatan terkait penataan peraturan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sanksi administrasi 3.Optimalisasi Wilayah Bebas Korupsi	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 2 September, 23 September, 4 November, 30 September, 23 Desember, 16 Desember, 9 Desember, 25 November • 13 Feb, 17 Mei, 13 Agustus 2024 • 20 September 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan integritas saat Apel • Sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan limbah B3 • Evaluasi Kinerja DLH

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
12	Pengelolaan limbah B3 tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan SOP (risiko fraud)	ROO.21.211.13.13				Tidak terjadi	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN Peraturan Bupati Banyumas No.44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Bupati Banyumas No. 59 Tahun 2017 secara bertahap. 2 Sosialisasi kepada Pelaku Usaha/Kegiatan terkait penataan peraturan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sanksi administrasi 3.Optimalisasi Wilayah Bebas Korupsi	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 2 September, 23 September, 4 November, 30 September, 23 Desember, 16 Desember, 9 Desember, 25 November • 15 November, 12 September, 13 November, 5 November • 20 Desember 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan integritas saat Apel • Rapat-rapat perizinan • Evaluasi Kinerja DLH
13	Pengelolaan sampah di KSM tidak berjalan dengan baik (risiko fraud)	ROO.21.103.13.13				Tidak terjadi	Meningkatkan kompetensi personil dan dan penguatan kelembagaan KSM	Triwulan I, II, III, IV	3 Mei & 10 Desember 2024	Koordinasi dan Evaluasi pengelolaan sampah dengan KSM

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
14	Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/tim pemroses penerbitan perizinan (risiko fraud)	ROO.21 .211.13. 13				Tidak terjadi	1. Penguatan integritas pada saat apel 2. Optimalisasi SOP 3. Transparansi perizinan	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> 2 September, 23 September, 4 November, 30 September, 23 Desember, 16 Desember, 9 Desember, 25 November 15 November, 12 September, 13 November, 5 November 20 Desember 2024 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan integritas saat Apel Rapat-rapat perizinan Evaluasi Kinerja DLH
15	Penyusunan spesifikasi teknis mengarah kepada spesifikasi/merk/produk tertentu (risiko fraud)	ROO.21 .XXX.13 .13				Tidak terjadi	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN sesuai Peraturan Peraturan Bupati Banyumas No.44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Peraturan Bupati Banyumas No. 59 Tahun 2017 secara bertahap. 2. Optimalisasi WBS.	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> 2 September 2024 20 Desember 2024 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan integritas saat apel Evaluasi Kinerja DLH

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
16	Pohon yang ditanam untuk RTH tidak tumbuh (mati) (risiko fraud)	ROO.21 .211.13. 13				Tidak terjadi	Meningkatkan pemeliharaan dan pengawasan di RTH publik	Triwulan I, II, III, IV	20 Feb, 13 & 15 Maret, 13 April, 7 Juni, 24 Des 2024	Dokumentasi pemeliharaan RTH
17	Proses penerbitan rekomendasi lingkungan lama (risiko fraud)	ROO.21 .211.13. 13				Tidak terjadi	Sosialisasi dan pelatihan bagi personil pelayanan perizinan	Triwulan I, II, III, IV	15 November, 12 September, 13 November, 5 November 2024	Rapat koordinasi perizinan di bidang TL
18	Sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3 tidak terkelola dengan baik (risiko fraud)	ROO.21 .211.13. 13				Tidak terjadi	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait sampah spesifik LB3 dan melengkapi prasarana dalam pengumpulan LB3	Triwulan II dan III	26 Juni, 27 Agustus, 25 Sept, 22 Okt 2024	Sosialisasi LB3 kepada pelaku usaha
19	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih kurang dan belum optimal (risiko fraud)	ROO.21 .103.13. 13				Tidak terjadi	Mengoptimalkan sarana dan prasana persampahan serta meningkatkan kinerja SDM pengolahan sampah		3 Mei, 10 Desember 23-25 Desember 2024	Rapat dengan KSM dan UPKP Pemeliharaan alat pengolah sampah

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
20	Terjadi pencemaran air, udara dan kerusakan tanah (risiko fraud)	ROO.21 .211.13. 13				Tidak terjadi	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan sumber daya tanah, air dan udara	Triwulan II dan III	7,12,20,28 Februari 7 Maret 8,14,27 Mei 20 Juni 19 Juli 20 Agustus 4,11,13,16,18,19,20, 25,26 September 2,10,15,24,31 Oktober 12,14, 15,19,28 November 5,11,16 Desember 2024	Rapat-rapat Proklim
21	Tidak semua desa mendapatkan sosialisasi dan pembinaan Program Kampung Iklim (risiko fraud)	ROO.21 .211.13. 13				Tidak terjadi	Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan monev kampung iklim	Triwulan I, II, III, IV	7,12,20,28 Februari 7 Maret 8,14,27 Mei 20 Juni 19 Juli 20 Agustus 4,11,13,16,18,19,20, 25,26 September 2,10,15,24,31 Oktober 12,14, 15,19,28 November 5,11,16 Desember 2024	Rapat-rapat Proklim

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
22	Tidak semua sekolah mendapatkan sosialisasi dan pembinaan sekolah adiwiyata (risiko fraud)	ROO.21 .211.13. 13				Tidak terjadi	Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan monev sekolah Adiwiyata	Triwulan I, II, III, IV	19 Februari 2024 8 Okt 2024 5 November 2024	Kegiatan Adiwiyata
23	Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup (risiko fraud)	ROO.21 .211.13. 13				Tidak terjadi	Meningkatkan edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat peduli lingkungan hidup, pendampingan terhadap kader dalam melaksanakan tugasnya	Triwulan II dan III	12 Oktober 2024	Kegiatan dengan kader lingkungan

Sumber : MRI, DLH Kab. Banyumas